

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 ATAS
PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 96
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
TERKAIT DALUWARSA PENUNTUTAN
PEMBAYARAN UPAH PEKERJA**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Heny Fitri Khumaidah**
- b. NIM : 105010113111002**
- c. Konsentrasi : Hukum Perburuhan**

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbng Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. A. Rachmad Budiono,SH.MH
NIP. 195911181986011002**

**Ratih Dheviana Puru H.T.,SH.LLM
NIP. 197907282005022001**

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata**

**Siti Hamidah, SH.MM
NIP. 196606221990022001**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
100/PUU-X/2012 ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 96
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT DALUWARSA
PENUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA**

Oleh:

HENY FITRI KHUMAIDAH

105010113111002

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis

Sekretaris Majelis

**Dr. A. Rachmad Budiono,SH.MH
NIP. 195911181986011002**

**Ratih Dheviana Puru H.T.,SH.LLM
NIP. 197907282005022001**

Anggota

Anngota

**Umu Hilmy,SH.MH
NIP194907121984002001**

**M.Zairul Alam,SH.MH
NIP. 197409092006011002**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**

**Dr. Sihabudin,SH.,MH.
NIP. 195912161985031001**

**Siti Hamidah, SH.MM
NIP. 196606221990022001**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah Memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin,SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Siti Hamidah, SH.MM selaku Ketua program Hukum Perdata
3. Bapak Dr. A. Rachmad Budiono,SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya
4. Ibu Ratih Dheviana Puru H.T.,SH.LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya
5. Pihak-Pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Ringkasan.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Upah dan Segala Pembayaran yang Timbu dari Hubungan Kerja.....	15
B. Hubungan Kerja	18
C. Daluwarsa	19
D. Perselisihan Hubungan Industrial	21
E. Tujuan Hukum	25
F. Wewenang Mahkamah Knstitusi	27
G. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	31
H. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
F. Definisi Konseptual	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upah sebagai Unsur Hubungan Kerja ditinjau sebagai Hak Konstitusioanal Warganegara	43
B. Daluwarsa Pembayaran Upah Pekerja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.....	47
C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketengakerjaan terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah pekerja	53
1. Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012	53
a. Latar Belakang diajukan Uji Materiil Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	53
b. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materiil Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	61
c. Putusan mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Uji Materiil Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	71
d. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 terkait Permohonan Uji Materiil Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	73
2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 terhadap Subjek Hukum, peraturan Terkait dan Perkara Terkait.....	79

BAB V PENUTUP

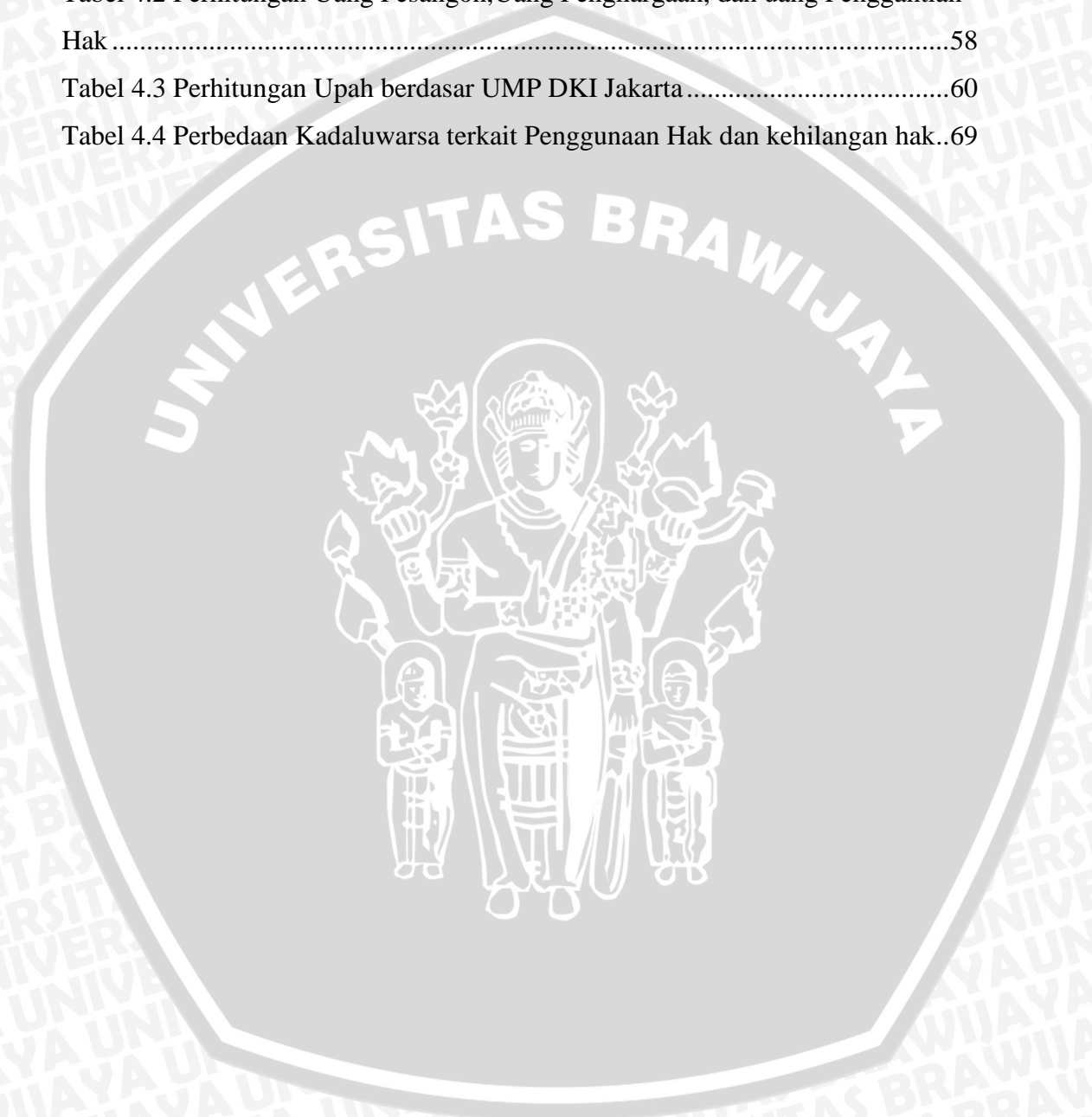
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ragam Pendapat Tokoh terkait Tujuan Hukum	26
Tabel 4.1 Jangka Waktu Daluwarsa berdasarkan Pasal 1967-1971 KUHP	48
Tabel 4.2 Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, dan uang Penggantian Hak	58
Tabel 4.3 Perhitungan Upah berdasar UMP DKI Jakarta	60
Tabel 4.4 Perbedaan Kadaluwarsa terkait Penggunaan Hak dan kehilangan hak..	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Non Litigasi	24
Gambar 2.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Litigasi	25
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	42



RINGKASAN

Heny Fitri Khumaidah, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 96 UNDANG-UNDANG KETENGAKERJAAN TERKAIT DALUWARSA PENUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA, Dr. A. Rachmad Budiono,SH.MH, Ratih Dheviana Puru H.T.,SH. LLM

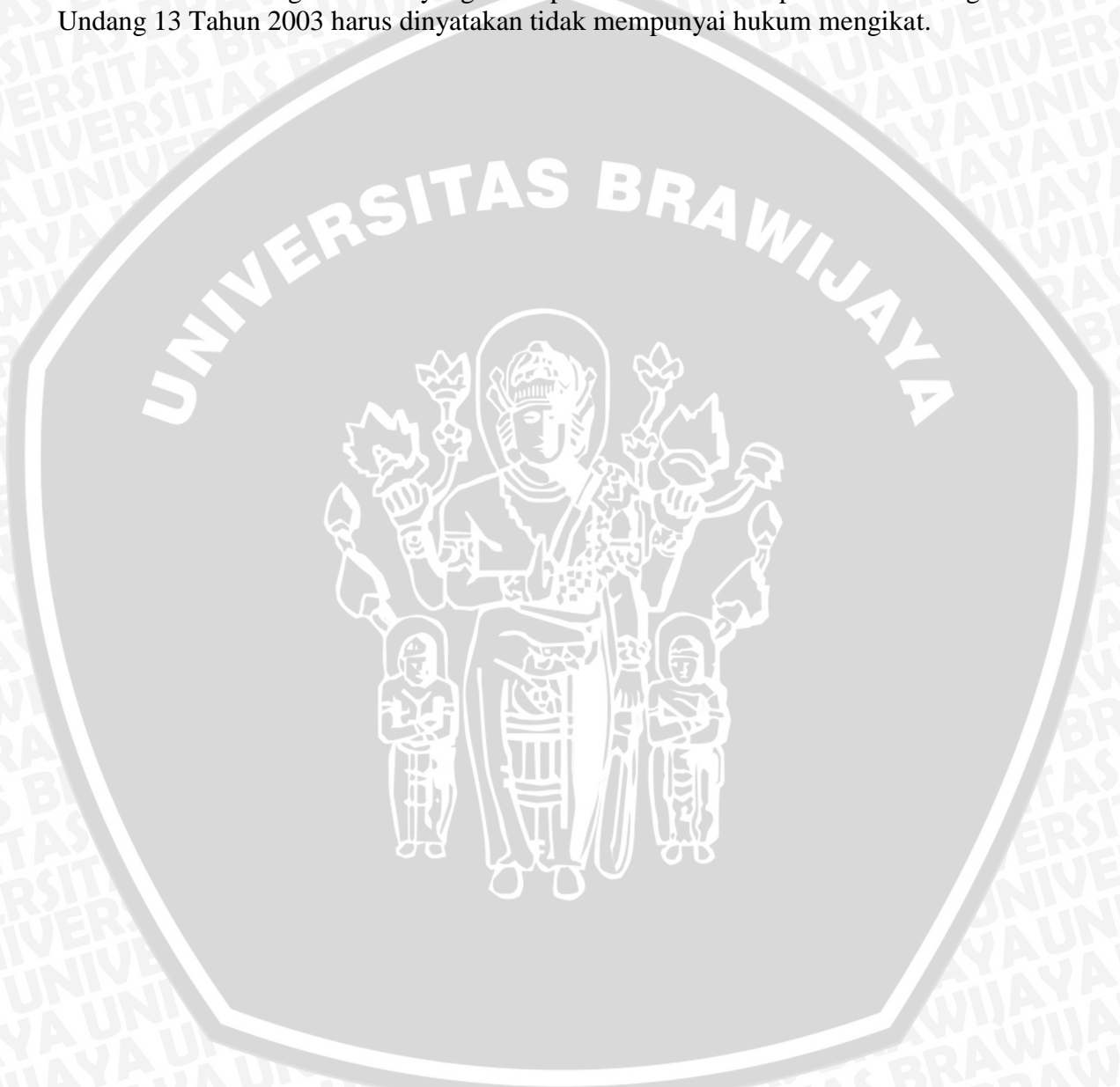
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas permohonan uji materiil ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 terkait daluwarsa penuntutan pembayaran upah pekerja. Ketentuan terkait daluwarsa di Indonesia sudah digunakan sejak jaman Belanda yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum. Namun ketentuan daluwarsa dalam Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dapat menimbulkan problematika, karena sejak dikeluarkannya putusan ini buruh dapat menuntut pembayaran upah kapan saja sejak timbulnya hak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU-X/2012 atas permohonan uji materiil pasal 96 undang-undang ketengakerjaan terkait daluwarsa penuntutan pembayaran upah pekerja?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi. Bahan hukum dianalisis dengan metode interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis dan sosiologis.

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja merupakan norma hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh Negara. Namun, ada peraturan yang membatasi hak-hak pekerja terkait upah dengan adanya daluwarsa, jika selama jangka waktu 2 tahun pekerja tidak menuntut pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981, maka pekerja kehilangan hak untuk menuntut pembayaran upah kepada pengusaha. Marten Boiliu pekerja PT. Shandy Putra Makmur menganggap Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 melanggar hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakahn bahwa Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga para pekerja dapat menuntut pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja kapan saja sejak timbulnya hak. Putusan Mahkamah Konstitusi ini

memberikan manfaat bagi pekerja, namun disisi lain pengusaha sebagai pelaku usaha dan juga sebagai warganegara Indonesia juga harus dilindungi. Maka dari itu diperlukan regulasi untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi guna tercipta iklim usaha yang dinamis. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan sehingga subjek hukum dan perkara yang terkait dengan tuntutan pembayaran upah sebelum putusan ini dianggap sah dan terhadap peraturan terkait yaitu Pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 sebagai norma yang diadopsi oleh ketentuan pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 harus dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat.



SUMMARY

Heny Fitri Khumaidah, Labor Law Faculty of Law, Brawijaya University, August 2014, JURIDICAL IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 100/PUU-X/2012 ON THE APPLICATION OF MATERIAL TEST FOR ARTICLE 96 OF EMPLOYMENT LAW RELATED TO EXPIRING WORKERS COMPENSATION PAYMENTS, Dr. A. Rachmad Budiono,SH.MH, Ratih Dheviana Puru H.T.,SH. LLM

This thesis background is the Constitutional Court Decision No. 100 / PUU-X / 2012 on the application for judicial review provisions of Article 96 of Law 13 of 2003 related to the expiring wage payment statute. Relevant provisions expired in Indonesia has been used since the days of the Dutch to ensure legal certainty. But the provision expired in Article 96 of Law 13 of 2003 is declared contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. This can lead to problematic because since this decision, workers can demand payment of wages at any time since the onset of the right.

Based on this case, the formulation of the issues raised is how the juridical implications of the constitutional court decision number 100 / PUU-X / 2012 on the application of Article 96 judicial legislation statute of limitations related to the payment of workers' wages.

This type of research used is normative juridical approach by using legislation, concepts, and analysis. Legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary obtained by literature study and documentation. Legal materials were analyzed by the interpretation method such as grammatical interpretation, systematic and sociological.

The results of this thesis show that obtaining a job and earn rewards and equitable treatment in employment relationship is a human right norms enshrined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that need to be protected, secured and met by the State. However, there are regulations that restrict the rights of workers associated with the expired wage, if over a period of 2 years for workers demanding payment of wages and all payments arising from the employment relationship that is regulated in Article 96 of Law 13 of 2003 and Article 30 of Regulation 8 in 1981, the workers lose the right to demand payment of wages to employers. Marten Boiliu who is the worker of PT. Shandy Putra Makmur in Article 96 of Law 13 of 2003, there is violation of this constitutional rights as a citizen to file a petition for judicial review in the Constitutional Court. Constitutional Court states in its decision that Article 96 of Law 13 of 2003 is declared contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and has no binding force. Therefore, workers can demand payment of wages and all arising from the employment relationship at any time since the onset of the right. The Constitutional Court's decision to provide benefits for workers, but the other businesses and entrepreneurs as well as Indonesian citizens should also be protected. Thus the necessary regulations to ensure certainty and fairness for workers and employers after the Constitutional Court's decision to create a dynamic business climate. Constitutional Court decision applies to the front so that the subject and case law



relating to the payment of wage claims before the decision is considered valid and the associated regulations, namely Article 30 of Government Regulation 8 of 1981 as a norm adopted by the provisions of article 96 of Law 13 of 2003 that must be declared has no legal binding.

